

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dapat selesai seperti yang diharapkan.

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja (Renja) ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap Kota Pangkalpinang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Pangkalpinang, 2 Juni 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA PANGKALPINANG



M. AGUS SALIM, S.T.
PEMBINA TINGKAT I / IV b
NIP. 197407162005011008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Peraturan Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun 2025
3. Renja Perubahan OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun pertama

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi tahun pertama RPJMD paruh ke dua dari RPJP-D Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 dan hasil evaluasi penyelenggaraan RPJMD tahun 2024-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
16. Nomor 517);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
17. Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);
 19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
 21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01).
 22. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
 23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025, meliputi :

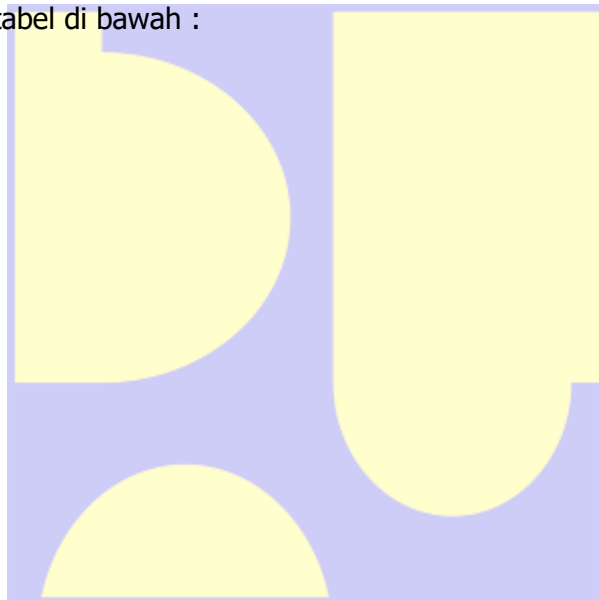
- | | |
|---------|--|
| BAB I | <p>Pendahuluan</p> <p>Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan</p> |
| BAB II | <p>Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu</p> <p>Menjelaskan evalausi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.</p> |
| BAB III | <p>Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan</p> <p>Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan</p> |
| BAB IV | <p>Rencana Kerja dan Pendanaan</p> <p>Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan OPD</p> |
| BAB V | <p>Penutup</p> |

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PUPR Tahun 2024

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Tahun 2024 (Tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :



TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang s.d 2024

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	010301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	60	7.977.151.686	60	7.318.311.081	100	91,741	SEKRETARIS (PUPR)
2		010301201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	10.495.000	100	10.495.000	100	100	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
3		010301201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	3.000.000	1	3.000.000	100	100	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
4		010301201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	4.695.000	2	4.695.000	100	100	Kasubbag. PEP dan Keuangan
5		010301201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	2.800.000	4	2.800.000	100	100	Kasubbag. PEP dan Keuangan
6		010301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	6.381.376.518	99,960	6.102.826.089	99,960	95,635	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
7		010301202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	58	6.371.986.518	58	6.098.131.089	100	95,702	Kasubbag. PEP dan Keuangan
8		010301202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.695.000	1	4.695.000	100	100	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

RENJA PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2025

9		010301202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.695.000	0	0	0	0	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
10		010301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	715.038.500	99,960	658.303.999	99,960	92,066	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
11		010301206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	20.300.000	8	7.900.000	100	38,916	Kasubbag. PEP dan Keuangan
12		010301206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	23.300.000	2	22.585.000	100	96,931	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
13		010301206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	60	109.738.500	100	84.771.000	100	77,248	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
14		010301206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	33.700.000	5	22.600.000	100	67,062	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
15		010301206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	525.000.000	12	517.450.999	100	98,562	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
16		010301206010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	3.000.000	1	2.997.000	100	99,900	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
17		010301207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	20.000.000	0	0	0	0	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
18		010301207006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	20.000.000	0	0	0	0	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
19		010301208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	604.659.972	99,960	409.726.046	99,960	67,761	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
20		010301208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	216.000.000	1	97.465.544	100	45,123	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
21		010301208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	57.500.000	1	17.610.150	100	30,626	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
22		010301208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	331.159.972	1	294.650.352	100	88,975	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
23		010301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	245.581.696	99,960	136.959.947	99,960	55,770	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

24		010301209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	63.681.696	1	47.876.292	100	75,181	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
25		010301209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	7	181.900.000	7	89.083.655	100	48,974	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,000	91,741	
PREDIKAT KINERJA									ST	ST	
26	-	010302	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (Dengan Satuan:%)	35,020	4.157.026.448	45,810	2.776.825.012	100	66,798	Bidang Sumber Daya Air
27		010302201	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (Dengan Satuan:ha)	375,840	4.157.026.448	191,315	2.776.825.012	50,903	66,798	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
28		010302201011	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	1	201.229.000	1	200.268.000	100	99,522	Sub Koordinator Teknik Pengairan Ahli Muda
29		010302201014	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	1	501.848.000	3	499.827.000	100	99,597	Sub Koordinator Teknik Pengairan Ahli Muda
30		010302201049	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	3.453.949.448	1	2.076.730.012	100	60,126	Sub Koordinator Teknik Pengairan Ahli Muda
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,000	66,798	
PREDIKAT KINERJA									ST	S	
31	-	010303	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (Dengan Satuan:%)	31,300	251.889.800	307,260	237.214.122	100	94,174	Bidang Sumber Daya Air
32		010303201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematika tertentu yang terbangun (Dengan Satuan:%)	100	251.889.800	36	237.214.122	36	94,174	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
33		010303201028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Dengan Satuan:Liter/Detik)	170	251.889.800	350	237.214.122	100	94,174	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

**RENJA PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2025**

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,000	94,174	
PREDIKAT KINERJA									ST	ST	
34	-	010305	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. (Dengan Satuan:%)	85	1.213.898.284	99,750	1.102.933.906	100	90,859	Bidang Cipta Karya
35		010305201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S (Dengan Satuan:Rumah)	550	1.213.898.284	2.564	1.102.933.906	100	90,859	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
36		010305201013	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja (Dengan Satuan:Unit)	2	467.592.284	2	376.190.606	100	80,453	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
37		010305201041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dengan Satuan:dokumen)	2	746.306.000	3	726.743.300	100	97,379	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,000	90,859	
PREDIKAT KINERJA									ST	ST	
38	-	010306	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase berkurangnya potensi banjir dan genangan air (Dengan Satuan:%)	10	10.833.274.403	8,750	10.576.498.708	87,500	97,630	Bidang Sumber Daya Air
39		010306201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Dalam kota (Dengan Satuan:%)	100	10.833.274.403	113	10.576.498.708	100	97,630	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
40		010306201005	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Dengan Satuan:Sistem Drainase Perkotaan)	59.420	6.984.121.000	38	6.926.723.828	0,064	99,178	Sub Koordinator Teknik Pengairan Ahli Muda
41		010306201028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Dengan Satuan:Sistem Drainase Perkotaan)	11.655	3.849.153.403	37	3.649.774.880	0,317	94,820	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									87,500	97,630	
PREDIKAT KINERJA									T	ST	
42	-	010308	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota (Dengan Satuan:%)	25	7.781.339.676	9	7.430.016.442	36	95,485	Bidang Cipta Karya
43		010308201	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting (Dengan Satuan:Dokumen)	250	7.781.339.676	121	7.430.016.442	48,400	95,485	Sub Koordinator Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda

**RENJA PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2025**

44		010308201021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:dokumen)	10	7.532.062.676	1	7.211.539.442	10	95,745	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
45		010308201023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dengan Satuan:dokumen)	1	249.277.000	51	218.477.000	100	87,644	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									36,000	95,485	
PREDIKAT KINERJA									SR	ST	
46	-	010310	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	94,100	24.852.491.346	93,910	24.584.883.183	99,798	98,923	Bidang Bina Marga
47		010310201	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan yang Dibangun (Dengan Satuan:%)	100	24.852.491.346	100	24.584.883.183	100	98,923	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
48		010310201001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dengan Satuan:Dokumen)	2	303.231.000	3	299.381.638	100	98,731	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
49		010310201004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (Dengan Satuan:KM)	1	195.149.000	228,676	139.382.350	100	71,424	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
50		010310201005	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Dengan Satuan:KM)	406,140	1.168.572.000	407,570	1.161.433.659	100	99,389	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
51		010310201008	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (Dengan Satuan:KM)	2	11.040.405.100	4,295	10.992.049.100	100	99,562	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
52		010310201010	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (Dengan Satuan:KM)	3	7.594.535.000	6,592	7.538.583.800	100	99,263	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
53		010310201011	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Dengan Satuan:KM)	1	2.561.327.512	2,850	2.477.893.586	100	96,743	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
54		010310201012	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Dengan Satuan:Jembatan)	240	1.685.574.234	21	1.674.328.000	8,750	99,333	Sub Koordinator Teknik Jalan dan Jembatan

**RENJA PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2025**

											Ahli Muda
55		010310201030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya (Dengan Satuan:KM)	3	303.697.500	3	301.831.050	100	99,385	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									99,798	98,923	
PREDIKAT KINERJA									ST	ST	
56	-	010312	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang Perda RTRW (Dengan Satuan:%)	80	673.043.568	99,960	630.369.703	100	93,660	Bidang Tata Ruang
57		010312202	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RRTR (Dengan Satuan:%)	100	281.500.000	99,960	271.632.553	99,960	96,495	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
58		010312202002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	281.500.000	1	271.632.553	100	96,495	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda
59		010312203	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (Dengan Satuan:%)	100	263.400.176	99,960	256.619.036	99,960	97,426	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda
60		010312203003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dengan Satuan:dokumen)	1	263.400.176	1	256.619.036	100	97,426	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
61		010312204	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang (Dengan Satuan:%)	100	128.143.392	99,930	102.118.114	99,930	79,691	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
62		010312204004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dengan Satuan:Dokumen)	1	128.143.392	2	102.118.114	100	79,691	Sub Koordinator Penata Ruang Ahli Muda
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,000	93,660	
PREDIKAT KINERJA									ST	ST	
63	-	021004	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (Dengan Satuan:%)	100	535.382.134	100	515.049.327	100	96,202	Bidang Pertanahan
64		021004201	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen penyelesaian tanah sengketa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	535.382.134	3	515.049.327	100	96,202	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
65		021004201001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	10	488.382.134	11	478.616.349	100	98,000	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda

**RENJA PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2025**

66		021004201002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Berita Acara)	2	47.000.000	2	36.432.978	100	77,517	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,000	96,202	
PREDIKAT KINERJA									ST	ST	
67	-	021005	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (Dengan Satuan:%)	100	2.280.585.838	100	1.930.628.476	100	84,655	Bidang Pertanahan
68		021005201	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian (Dengan Satuan:%)	100	2.280.585.838	50	1.930.628.476	50	84,655	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
69		021005201002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	3	2.280.585.838	2	1.930.628.476	66,667	84,655	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,000	84,655	
PREDIKAT KINERJA									ST	T	
70	-	021006	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berawal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Dengan Satuan:%)	100	111.650.000	100	84.559.860	100	75,737	Bidang Pertanahan
71		021006201	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	SK Bupati/Walikota tentang penetapan Penerapan Besarnya Ganti Rugi kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee (Dengan Satuan:SK)	2	111.650.000	1	84.559.860	50	75,737	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
72		021006201001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	29.950.000	1	24.770.000	100	82,705	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
73		021006201002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	81.700.000	2	59.789.860	100	73,182	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,000	75,737	
PREDIKAT KINERJA									ST	T	
74	-	021008	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong (Dengan Satuan:%)	100	451.851.960	100	443.219.039	100	98,089	-

**RENJA PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2025**

75		021008202	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase laporan inventaisasi dan pemanfaatan tanah kosong (Dengan Satuan:%)	100	451.851.960	100	443.219.039	100	98,089	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
76		021008202001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Dengan Satuan:Laporan)	1	256.051.960	3	252.825.289	100	98,740	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
77		021008202002	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dengan Satuan:Dokumen)	1	195.800.000	2	190.393.750	100	97,239	Sub Koordinator Penata Pertanahan Ahli Muda
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,000	98,089	
PREDIKAT KINERJA									ST	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)									93,608	90,329	
PREDIKAT KINERJA									ST	ST	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			--								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			--								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:			--								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:			--								
Dievaluasi Kota Pangkalpinang, tanggal 21-02-2025 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PANGKALPINANG M.AGUS SALIM. ,S.T. NIP.197407162005011008											

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kinerja OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang apabila dinilai berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian renstra sudah cukup baik dilihat dari persentase capaian kegiatan karena sebagian besar kegiatan telah terlaksana dengan baik, namun apabila dibandingkan dari kesesuaian antara IKU kota, dokumen RENSTRA, IKU, Perkin dan RKT maka tidak dapat dikatakan sesuai. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan mengacu RPJMD Kota Pangkalpinang disusun isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang dua tahun mendatang.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KOTA PANGKALPINANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANALISIS HASIL KEBUTUHAN			
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA (Rp)	LOKASI		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA (Rp)	LOKASI
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			59.716.944.081,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			39.635.687.405,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			48.114.047.153,00		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			38.858.485.533,00	
-	-			48.114.047.153,00		-			38.858.485.533,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten / kota	35,02 %	2.129.305.000,00		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten / kota	35,02 %	1.655.230.704,00	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	338,256 ha	2.129.305.000,00		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	338,256 ha	1.655.230.704,00	
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya									

RENJA PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2025

		<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	1 Unit	1.518.468.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	1 Unit	1.543.556.704,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai									
		<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun</i>	3 Dokumen	610.837.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun</i>	2 Dokumen	111.674.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<i>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi</i>	36,17 %	706.092.000,00		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<i>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi</i>	36,17 %	11.197.534.950,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase meningkatnya kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematika tertentu yang terbangun</i>	100 %	706.092.000,00		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase meningkatnya kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematika tertentu yang terbangun</i>	100 %	11.197.534.950,00	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									

		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	35 Liter/Detik	706.092.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	35 Liter/Detik	11.197.534.950,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase volume sampah yang tertangani	87,5 %	3.672.900.000,00		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase volume sampah yang tertangani	87,5 %	120.000.000,00	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Timbunan Sampah yang ditangan	22,5 %	3.672.900.000,00		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Timbunan Sampah yang ditangan	15,0%	120.000.000,00	
1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
		Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	8 Unit	3.672.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1 Unit	120.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90 %	235.842.610,00		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90 %	338.830.982,00	

1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	700 rumah	235.842.610,00		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	700 rumah	338.830.982,00	
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja									
		Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	2 Unit	175.342.610,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	2 Unit	251.380.982,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	60.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	87.450.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase berkurangnya potensi banjir dan genangan air	-10 %	10.514.376.000,00		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase berkurangnya potensi banjir dan genangan air	-10 %	5.011.919.704,00	

1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Dalam kota</i>	100 %	10.514.376.000,00		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Dalam kota</i>	100 %	5.011.919.704,00	
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan									
		<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi</i>	22 Sistem Drainase Perkotaan	3.755.181.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi</i>	3 Sistem Drainase Perkotaan	1.824.919.704,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan									
		<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>	49 Sistem Drainase Perkotaan	6.759.195.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>	37 Sistem Drainase Perkotaan	3.187.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	<i>Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten / Kota</i>	30 %	7.323.184.000,00		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	<i>Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten / Kota</i>	30 %	2.919.974.176,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<i>IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting</i>	250 Dokumen	7.323.184.000,00		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<i>IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting</i>	250 Dokumen	2.919.974.176,00	

1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
		<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	10 Dokumen	7.029.834.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	7 Dokumen	2.743.674.176,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
		<i>Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</i>	250 Dokumen	293.350.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</i>	250 Dokumen	176.300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	94,7 %	14.414.777.200,00		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	94,7 %	7.210.237.762,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Panjang Jalan yang Dibangun</i>	100 %	14.414.777.200,00		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Panjang Jalan yang Dibangun</i>	100 %	7.210.237.762,00	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan									

		<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>	2 Dokumen	201.674.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>	0 Dokumen	0	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa									
		<i>Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya</i>	403,137 KM	25.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya</i>	403,137 KM	100.450.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan									
		<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>	1,3 KM	1.613.481.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>	1,04 KM	789.192.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan									
		<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>	1,7 KM	4.150.602.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>	0,4 KM	4.447.310.450,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan									

		<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala</i>	1,7 KM	6.364.221.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala</i>	0,15 KM	205.538.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									
		<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>	120 KM	67.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>	120 KM	70.400.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan									
		<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	1 KM	1.992.299.200,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	0,7 KM	1.597.347.312,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<i>Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang Perda RTRW</i>	90 %	2.377.269.994,00		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<i>Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang Perda RTRW</i>	90 %	2.076.543.568,00	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	<i>Persentase tersusunnya dokumen RDTR</i>	100 %	57.100.000,00		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	<i>Persentase tersusunnya dokumen RDTR</i>	100 %	48.350.000,00	
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang									

		<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>	1 Laporan	57.100.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>	1 Laporan	48.350.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Laporan Koordinasi dan Sinkronasi penyusunan RRTR</i>	100 %	2.019.649.994,00		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Laporan Koordinasi dan Sinkronasi penyusunan RRTR</i>	100 %	1.597.000.000,00	
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota									
		<i>Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	2.019.649.994,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	1.597.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase laporan Koordinasi dan Sinkronasi Pemanfaatan Ruang</i>	100 %	104.500.000,00		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase laporan Koordinasi dan Sinkronasi Pemanfaatan Ruang</i>	100 %	47.750.000,00	
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang									

		<i>Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku</i>	1 Layanan	104.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku</i>	1 Layanan	47.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang</i>	100 %	196.020.000,00		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang</i>	100 %	383.443.568,00	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									
		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	1 Dokumen	196.020.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	1 Dokumen	383.443.568,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	65 Nilai 60.50 Nilai	11.740.300.349,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	65 Nilai 60.50 Nilai	8.328.213.687,00	

-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.958.980.000,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	523.990.352,00	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	216.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	174.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.222.327.150,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	294.990.352,00	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	600.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	320.253.038,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	14.400.000,00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	3.510.000,00	
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.550.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.150.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.210.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.100.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.150.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	100 %	7.246.222.199,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	100 %	6.208.978.301,00	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	7.246.222.199,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	6.208.978.301,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.222.327.150,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	442.053.338,00	
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.420.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.656.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	60 Paket	161.102.150,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	60 Paket	97.919.300,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	7 Paket	380.150.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	7 Paket	0	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	10 Paket	39.655.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	10 Paket	18.225.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									

		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	36.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah</i>	100 %	0,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah</i>	100 %	0,00	
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	1.958.980.000,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	523.990.352,00	
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	55.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	55.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1.687.980.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	294.990.352,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya barang milik perangkat daerah</i>	100 %	1.298.371.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya barang milik perangkat daerah</i>	100 %	1.149.681.696,00	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	43.250.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	66.181.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

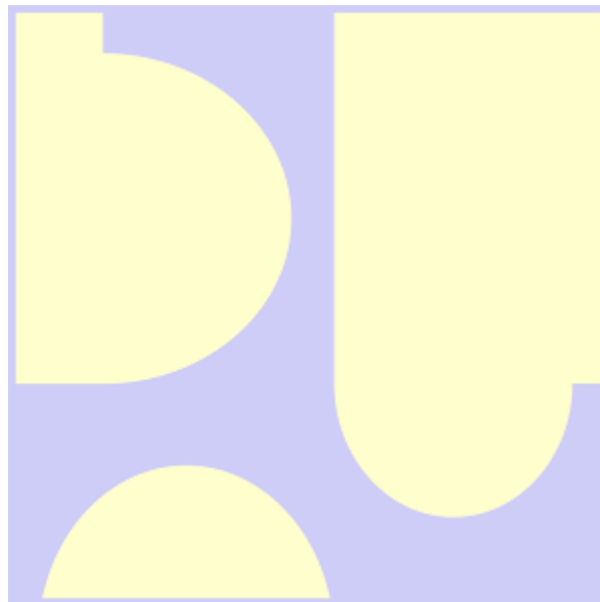
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	27 Unit	1.255.121.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	27 Unit	1.083.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.602.896.928,00		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			777.201.872,00	
-	-			6.602.896.928,00		-			777.201.872,00	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	<i>Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi</i>	100 %	372.429.000,00		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	<i>Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi</i>	100 %	22.200.000,00	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Dokumen penyelesaian tanah sengketa</i>	2 Dokumen	372.429.000,00		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Dokumen penyelesaian tanah sengketa</i>	2 Dokumen	22.200.000,00	
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		<i>Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Berita Acara	27.200.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Berita Acara	10.200.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									

		<i>Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	10 Dokumen	345.229.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	10 Dokumen	12.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	<i>Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</i>	100 %	5.611.598.128,00		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	<i>Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</i>	100 %	741.001.872,00	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian</i>	100 %	5.611.598.128,00		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian</i>	100 %	741.001.872,00	
2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
		<i>Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan</i>	3 Laporan	5.611.598.128,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		<i>Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan</i>	3 Laporan	741.001.872,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	<i>Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berawal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</i>	100 %	173.500.000,00		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	<i>Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berawal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</i>	100 %	0	

2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	SK Bupati/Walikota tentang penetapan Penerapan Besarnya Ganti Rugi kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	2 SK	173.500.000,00		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	SK Bupati/Walikota tentang penetapan Penerapan Besarnya Ganti Rugi kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	2 SK	0	
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah									
		Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	114.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah									
		Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	59.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong	100 %	445.369.800,00		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong	100 %	14.000.000,00	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase laporan inventaisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100 %	445.369.800,00		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase laporan inventaisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100 %	14.000.000,00	
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong									
		Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	226.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	7.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong									
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	218.469.800,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	7.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
J U M L A H				59.716.944.081,00	J U M L A H				39.635.687.405,00	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang melaksanakan kegiatan teknis yang sering langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih bersifat koordinatif dengan OPD baik vertikal maupun horizontal, sehingga dapat mengakomodir usulan masyarakat baik langsung maupun melalui Forum Musrenbang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan penjabaran dari pernyataan misi, dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 adalah: "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah jabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

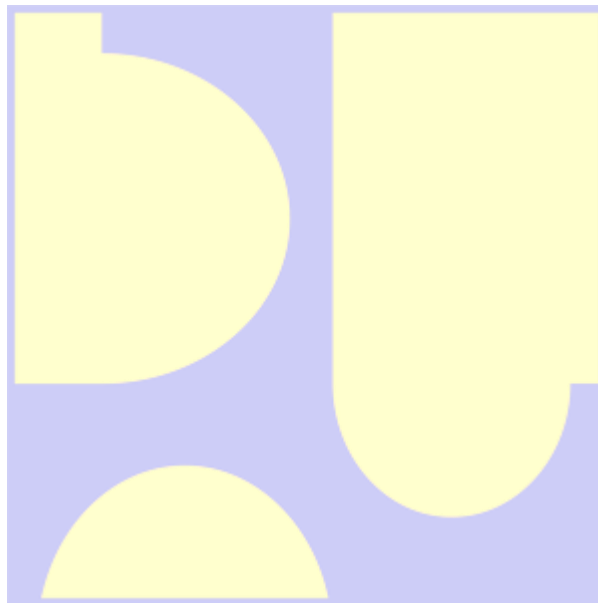
Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
 - 1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;

- 2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
- 3) Kapasitas tampung per kapita;
- 4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - 1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
 - 2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
 - 1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
 - 2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
 - 1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
 - 2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
 - 3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
 - 4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
 - 5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;

6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung pencapaian sasaran ke-: 5 (lima) yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif yang ditetapkan dalam salah satu tujuan RPD kota pangkalpinang yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur melalui pengelolaan lingkungan hidup Yang Berkelanjutan.



3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

a. Tujuan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Pembangunan melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Handal

b. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang yaitu :

1. Meningkatkan Infrastruktur Pekerjaan Umum
2. Meningkatnya Pelayanan Air Bersih
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan air limbah
4. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang kota Pangkalpinang
5. Meningkatnya kepemilikan tanah pemerintah Kota Pangkalpinang

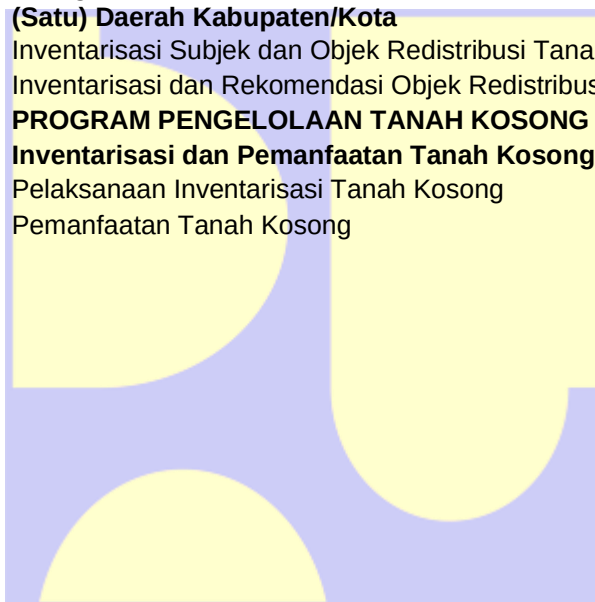
3.3 Program dan Kegiatan

Bersasarkan hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Didalam RENJA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2025 program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang akan melaksanakan 9 program pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4 Program pada urusan Pertanahan. Adapun Program dan Kegiatan tersebut dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.03,02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
1.03,03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
1.03,04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1,03,05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
1,03,06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
1,03,08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
1,03,10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan
1,03,12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

2,10,04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2,10,05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2,10,06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah
2,10,08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong

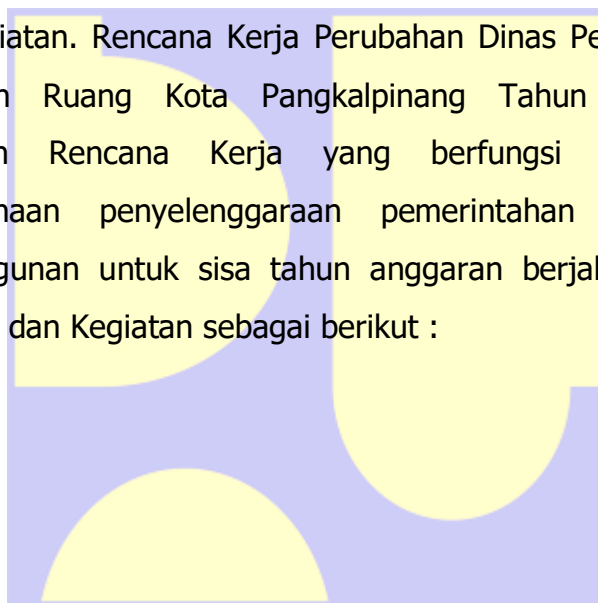


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan OPD

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang pada APBD Perubahan Tahun 2025 mendatang akan melaksanakan 9 program pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan 4 Program pada urusan Pertanahan. Adapun Program dan Kegiatan tersebut dijabarkan dalam 13 (tiga belas) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan dokumen Rencana Kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk sisa tahun anggaran berjalan, dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :



TABEL 4.1

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASION AL	DAERA H				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				59.716.944.081,00	56.613.802.883,00	39.635.687.405,00	- 20.081.256.676,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				53.114.047.153,00	51.530.901.011,00	38.858.485.533,00	- 14.255.561.620,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				53.114.047.153,00	51.530.901.011,00	38.858.485.533,00	- 14.255.561.620,00							0,00	
1,	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	60.50 65 Nilai Nilai	60.50 65 Nilai Nilai	11.740.300.349,00	9.519.159.603,00	8.328.213.687,00	- 11.740.300.349,00							0,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	100 %	14.400.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	-10.890.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

													Birokrasi dan Demokrasi Daerah				
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.550.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-4.400.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.750.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	-3.540.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	4 Laporan	4.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-2.950.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP</i>	100 %	100 %	7.246.222.199,00	6.806.617.367,00	6.208.978.301,00	-1.037.243.898,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	58 Orang /bulan	57 Orang /bulan	7.246.222.199,00	6.806.617.367,00	6.208.978.301,00	-1.037.243.898,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

											PERJAN JIAN KERJA						
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.222.327.150,00	1.064.110.188,00	442.053.338,00	-780.273.812,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.420.000,00	5.420.000,00	2.656.000,00	-2.764.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

													Daerah				
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	380.150.000,00	447.730.000,00	0,00	-380.150.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	60 Paket	161.102.150,00	153.702.150,00	97.919.300,00	-63.182.850,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															

			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	10 Paket	10 Paket	39.655.000,00	40.255.000,00	18.225.000,00	-21.430.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	381.003.038,00	320.253.038,00	-279.746.962,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	36.000.000,00	3.000.000,00	-33.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah	100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00		-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.958.980.000,00	495.240.352,00	523.990.352,00	-1.434.989.648,00		-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Lapor an	1 Lapor an	216.000.000,00	144.000.000,00	174.000.000,00	-42.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Akselera si Reforma si Birokrasi dan Demokra si Daerah Akselera si Reforma si Birokrasi dan Demokra si Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Lapor an	1 Lapor an	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Akselera si Reforma si Birokrasi dan Demokra si Daerah Akselera si Reforma si Birokrasi dan Demokra si Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Lapor an	1 Lapor an	1.687.980.000,0 0	296.240.352,00	294.990.352,00	- 1.392.989.648,0 0	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Akselera si Reforma si Birokrasi dan Demokra si Daerah Akselera si Reforma si Birokrasi dan Demokra si Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya barang milik perangkat daerah</i>	100 %	100 %	1.298.371.000,00	1.149.681.696,00	1.149.681.696,00	-148.689.304,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	1 Unit	43.250.000,00	66.181.696,00	66.181.696,00	22.931.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	27 Unit	27 Unit	1.255.121.000,00	1.083.500.000,00	1.083.500.000,00	-171.621.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

2,	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten / kota	35,02 %	35,02 %	2.129.305.000,00	1.755.230.704,00	1.655.230.704,00	2.129.305.000,00	-						0,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	338,256 ha	338,256 ha	2.129.305.000,00	1.755.230.704,00	1.655.230.704,00	-474.074.296,00		-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya															
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1.518.468.000,00	1.543.556.704,00	1.543.556.704,00	25.088.704,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai															

			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun</i>	3 Dokumen	2 Dokumen	610.837.000,00	211.674.000,00	111.674.000,00	-499.163.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3,	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	36,17 %	36,17 %	706.092.000,00	11.553.795.962,00	11.197.534.950,00	-706.092.000,00							0,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematika tertentu yang terbangun	100 %	100 %	706.092.000,00	11.553.795.962,00	11.197.534.950,00	10.491.442.950,00		-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan															
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	35 Liter/Detik	35 Liter/Detik	706.092.000,00	11.553.795.962,00	11.197.534.950,00	10.491.442.950,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-RE	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

											GULER		Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an				
4,	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANG AN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase volume sampah yang tertangani	87,5 %	87,5 %	3.672.900.000,0 0	145.000.000,00	120.000.000,00	- 3.672.900.000,0 0							0,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Timbunan Sampah yang ditangani	15,0 %	15,0 %	3.672.900.000,0 0	145.000.000,00	120.000.000,00	- 3.552.900.000,0 0		-	Peningk atan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an Peningk atan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01. 0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS															
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS yang Disediakan	8 Unit	1 Unit	3.672.900.000,0 0	145.000.000,00	120.000.000,00	- 3.552.900.000,0 0	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Peningk atan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an Peningk atan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

5,	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90 %	90 %	235.842.610,00	363.830.982,00	338.830.982,00	-235.842.610,00							0,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	700 rumah	700 rumah	235.842.610,00	363.830.982,00	338.830.982,00	102.988.372,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja															
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	175.342.610,00	251.380.982,00	251.380.982,00	76.038.372,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)															
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	60.500.000,00	112.450.000,00	87.450.000,00	26.950.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

													Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan				
6,	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase berkurangnya potensi banjir dan genangan air	-10 %	-10 %	10.514.376.000,00	10.432.392.704,00	5.011.919.704,00	-10.514.376.000,00							0,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Dalam kota	100 %	100 %	10.514.376.000,00	10.432.392.704,00	5.011.919.704,00	-5.502.456.296,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan															
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	22 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	3.755.181.000,00	2.589.919.704,00	1.824.919.704,00	-1.930.261.296,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan															

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>	49 Sistem Drainase Perkotaan	37 Sistem Drainase Perkotaan	6.759.195.000,00	7.842.473.000,00	3.187.000.000,00	3.572.195.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7,	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten / Kota	30 %	30 %	7.323.184.000,00	4.592.774.176,00	2.919.974.176,00	- 7.323.184.000,00							0,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<i>IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting</i>	250 Dokumen	250 Dokumen	7.323.184.000,00	4.592.774.176,00	2.919.974.176,00	- 4.403.209.824,00		-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															

			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	7 Dokumen	7.029.834.000,00	4.395.974.176,00	2.743.674.176,00	- 4.286.159.824,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG															
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	250 Dokumen	250 Dokumen	293.350.000,00	196.800.000,00	176.300.000,00	-117.050.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8,	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	94,7 %	94,7 %	14.414.777.200,00	10.713.423.312,00	7.210.237.762,00	- 14.414.777.200,00							0,00	

1.03.10.2.01	Penyelenggaraa n Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan yang Dibangun	100 %	100 %	14.414.777.200, 00	10.713.423.312, 00	7.210.237.762,0 0	- 7.204.539.438,0 0		-	Peningk atan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an Peningk atan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01. 0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraa n Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Doku men	0 Doku men	201.674.000,00	0,00	0,00	-201.674.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Peningk atan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an Peningk atan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01. 0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														
		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraa nnya	403,1 37 KM	403,1 37 KM	25.000.000,00	100.450.000,00	100.450.000,00	75.450.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningk atan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an Peningk atan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan															
			Panjang Jalan yang Dibangun	1,3 KM	1.04 KM	1.613.481.000,00	1.184.192.000,00	789.192.000,00	-824.289.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan															
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1,7 KM	0.4 KM	4.150.602.000,00	5.976.496.000,00	4.447.310.450,00	296.708.450,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

											AAN UMUM						
	1.03.10.2.01. 0034	Pemeliharaan Berkala Jalan															
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala</i>	1,7 KM	0,15 KM	6.364.221.000,0 0	1.656.538.000,0 0	205.538.000,00	6.158.683.000,0 0	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD) INSENTI F FISKAL UNTUK PENGH ARGAA N KINERJ A TAHUN BERJAL AN DAU YANG DITENT UKAN P ENGGU NAANN YA BIDANG PEKERJ AAN UMUM	-	Peningk atan Kualitas Ekonomi Kerakyat an Peningk atan Kualitas Ekonomi Kerakyat an			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01. 0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan															

			<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>	120 KM	120 KM	67.500.000,00	70.400.000,00	70.400.000,00	2.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan															
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	1 KM	0.7 KM	1.992.299.200,00	1.725.347.312,00	1.597.347.312,00	-394.951.888,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOOTOR (PKB)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9,	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang Perda RTRW	90 %	90 %	2.377.269.994,00	2.455.293.568,00	2.076.543.568,00	- 2.377.269.994,00							0,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	<i>Persentase tersusunnya dokumen RDTR</i>	100 %	100 %	57.100.000,00	57.100.000,00	48.350.000,00	-8.750.000,00		-		Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang															

			<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>	1 Laporan	1 Laporan	57.100.000,00	57.100.000,00	48.350.000,00	-8.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RRTR</i>	100 %	100 %	2.019.649.994,00	1.880.500.000,00	1.597.000.000,00	-422.649.994,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	2.019.649.994,00	1.880.500.000,00	1.597.000.000,00	-422.649.994,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan Koordinasi dan Sinkronasi Pemanfaatan Ruang	100 %	100 %	104.500.000,00	104.500.000,00	47.750.000,00	-56.750.000,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang															
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1 Layanan	1 Layanan	104.500.000,00	104.500.000,00	47.750.000,00	-56.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	100 %	100 %	196.020.000,00	413.193.568,00	383.443.568,00	187.423.568,00			-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang															

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	1 Doku men	1 Doku men	196.020.000,00	413.193.568,00	383.443.568,00	187.423.568,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Peningk atan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an Peningk atan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.602.896.928,0 0	5.082.901.872,0 0	777.201.872,00	- 5.825.695.056,0 0							0,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				6.602.896.928,0 0	5.082.901.872,0 0	777.201.872,00	- 5.825.695.056,0 0							0,00	
1,	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN	Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	100 %	372.429.000,00	200.000.000,00	22.200.000,00	-372.429.000,00							0,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Dokumen penyelesaian tanah sengketa</i>	2 Doku men	2 Doku men	372.429.000,00	200.000.000,00	22.200.000,00	-350.229.000,00		-		Peningk atan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an Peningk atan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01. 0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															

			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Berita Acara	2 Berita Acara	27.200.000,00	19.200.000,00	10.200.000,00	-17.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	10 Dokumen	10 Dokumen	345.229.000,00	180.800.000,00	12.000.000,00	-333.229.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2,	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100 %	100 %	5.611.598.128,00	4.682.901.872,00	741.001.872,00	- 5.611.598.128,00							0,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian</i>	100 %	100 %	5.611.598.128,00	4.682.901.872,00	741.001.872,00	- 4.870.596.256,00		-		Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

			<i>Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	1 Doku men	1 Doku men	114.500.000,00	0,00	0,00	-114.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Peningk atan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an Peningk atan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.06.2.01. 0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah															
			<i>Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	1 Doku men	1 Doku men	59.000.000,00	0,00	0,00	-59.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Peningk atan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an Peningk atan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4,	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong	100 %	100 %	445.369.800,00	200.000.000,00	14.000.000,00	-445.369.800,00							0,00	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	<i>Persentase laporan inventaisasi dan pemanfaatan tanah kosong</i>	100 %	100 %	445.369.800,00	200.000.000,00	14.000.000,00	-431.369.800,00			-	Peningk atan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an Peningk atan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkung an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong															
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	1 Laporan	226.900.000,00	15.000.000,00	7.000.000,00	-219.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong															
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	1 Dokumen	218.469.800,00	185.000.000,00	7.000.000,00	-211.469.800,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		J U M L A H				59.716.944.081,00	56.613.802.883,00	39.635.687.405,00	-20.081.256.676,00							0,00	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 serta Renstra RPD Tahun 2024-2026, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pangkalpinang.

